

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian kali ini akan menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji kualitas data. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas.

##### 1. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan uji asumsi klasik maka uji heterokedastisitas merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, nilai probabilitas independen tidak signifikan berada pada derajat 5% menunjukkan bahwa terdapat varian yang sama atau terjadi homokedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan setiap variabelnya. Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Breusch-Pagan:

**Tabel 5.1**  
Uji Heterokedastisitas

Chi <sup>2</sup> (1)	Pro>chi <sup>2</sup>
2,63	0,1046

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi<sup>2</sup> sebesar 0,1046 yaitu > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel independent terbebas dari masalah heterokedastisitas.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada data penelitian maka perlu dilakukan dengan menguji koefisien korelasi antar variabel penelitian. Suatu model dikatakan baik apabila tidak terjadi

multikolinearitas antar variabel dependen dengan variabel independen (Gujarati, 2006).

Menurut (Basuki & Yuliadi, 2015) semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik. Pada uji multikolinearitas dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas jika signifikansi variabel  $< 10$ .

**Tabel 5. 2**  
Uji Multikolinearitas (VIF)

Variabel	VIF	1/VIF
Pendidikan	2,22	0,450862
PDRB	2,06	0,485652
UMK	1,14	0,877181
JP	1,10	0,908612
Mran VIF	1,63	

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uji multikolinearitas diatas bahwa nilai dari VIF antar variabel adalah  $< 10$  dengan rata-rata VIF sebesar 1,63. Hal tersebut menandakan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

## B. Analisis Pemilihan Model

### 1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian dimana untuk menentukan model *Fixed Effect* dan *Common Effect* yang paling digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika hasil uji chow menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *Common Effect*. Tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

**Tabel 5. 3**  
Uji Chow

Test Summary	Probabilitas
$F(4,26) = 2,62$	0,0582

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan dari uji chow diatas ditemukan bahwa D statistic (Prob > F) memiliki nilai 0,0582 atau > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel penelitian ini adalah model *Common Effect*.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model mana yang terbaik dari regresi data panel. Model penentuan yang digunakan adalah model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Jika hasil uji hausman menyatakan menerima hipotesis nol maka model terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*, namun jika hasilnya menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

**Tabel 5. 4**  
Uji Hausman

Chi2	Prob>Chi2
2,17	0,7041

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uji hausman yang sudah dilakukan dapat dilihat hasil nilai chi2 lebih besar dari 0,05 yaitu 0,7041 yang berarti menerima H0 dan menolak H1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji hausman model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect*.

### C. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Setelah menggunakan pengujian statistik untuk menggunakan model mana yang terbaik untuk digunakan dalam estimasi data panel, maka disimpulkan bahwa model terbaik adalah *Random Effect*. Akan digunakan untuk penelitian kali ini, yakni pendekatan model data panel yang mengkombinasikan data *Time Series* dan *Cross Section*. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan *Random Effect Model*.

**Tabel 5. 5**  
Hasil Estimasi Model *Random Effect*

Variabel Dependen: KEMISKINAN	Koefisien	Standar Error	Probabilitas
PDRB	-13,34404	0,6106597	0,000
JP	1,254471	0,6450082	0,052
UMK	-0,356416	1,245836	0,775
PENDIDIKAN	-1,673159	0,0849775	0,000

Sumber: Data Diolah, 2019

Dari hasil estimasi tabel diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel model *Random Effect* yang disimpulkan dengan persamaan:

$$KEMISKINAN_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 PENDIDIKAN_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

KEMISKINAN = Variabel Dependen (KEMISKINAN)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1234}$  = Koefisien Variabel 1,2,3,4

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

JP = Jumlah Penduduk

UMK = Upah Minimum Kabupaten

PENDIDIKAN	= Pendidikan
I	= Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Jogja
t	= 2011-2017

Dimana didapatkan hasil sebagai berikut:

$$KEMISKINAN_{IT} = a + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 PENDIDIKAN_{it} + e_{it}$$

$$KEMISKINAN = 120,5076 + -13,34404 PDRB_{it} + 1,254471 JP_{it} + -0,356416 UMK_{it} + -1,673159 PENDIDIKAN_{it}$$

Keterangan:

- $a$  = Dengan nilai sebesar 120,5076 dapat dijelaskan bahwa apabila semua variabel independent (PDRB, JP, UMK, dan PENDIDIKAN) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka kemiskinan sebesar 120,5076.
- $\beta_1$  = Nilai sebesar -13,34404 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah PDRB naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan 13,34404% dengan asumsi kemiskinan tetap.
- $\beta_2$  = Nilai sebesar 1,254471 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah penduduk naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami kenaikan 1,254471 juta jiwa dengan asumsi kemiskinan tetap.

$\beta_3$  = Nilai sebesar -0,356416 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah Upah Minimum Kabupaten naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan 0,356416% dengan asumsi kemiskinan tetap.

$\beta_4$  = Nilai sebesar -1,673159 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah pendidikan naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan 1,673159% dengan asumsi kemiskinan tetap.

#### **D. UJI Statistik**

Dalam penelitian ini dilakukan uji statistik meliputi uji parsial (T-statistik), uji simultan (F-statistik), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

##### **1. Uji Parsial (T-statistik)**

Uji T-statistik atau uji parsial ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (PDRB, JP, UMK, PENDIDIKAN) terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dapat diketahui dengan cara melihat koefisien regresi dan probabilitas dari setiap variabel independen serta dengan melihat standar probabilitas  $\alpha < 0,05$ .

**Tabel 5. 6**  
Uji Statistik

Variabel	T-Statistik	Prob	Standar Error
PDRB	-21.85	0.000	0.6106597
JP	1.94	0.052	0.6450082
UMK	-0.29	0.775	1.245836
PENDIDIKAN	-19.69	0.000	0.0849775

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar -21.85, dengan probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Jadi dapat diketahui bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikansi 5% terhadap kemiskinan.
- b. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar 1.94, dengan probabilitas sebesar 0.052 signifikan pada  $\alpha = 10\%$ . Jadi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 10% terhadap kemiskinan.
- c. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar -0.29, dengan probabilitas 0.775 signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Jadi dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan tidak signifikansi 5% terhadap kemiskinan.
- d. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar -19.69, dengan probabilitas 0.000 signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Jadi dapat diketahui bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikansi 5% terhadap kemiskinan.

## 2. Uji Simultan (F-statistik)

Uji simultan atau uji f-statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau keseluruhan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan dari estimasi hasil regresi yang didapatkan menggunakan pengolahan data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Models* pada *Stata13*, didapatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.0000 dengan standar probabilitas pada 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Berdasarkan hasil yang didapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau R kuadrat dapat berfungsi untuk mengetahui seberapa besar model dapat menerangkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini terletak dari rentang nol sampai satu. Semakin angkanya mendekati nol maka hal tersebut menandakan terbatasnya kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi dari variabel dependennya, namun jika semakin angkanya mendekati satu, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel independent yang terdapat dalam model mampu menerangkan prediksi informasi terhadap setiap perubahan dari variabel dependen.



Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan *Random Effect Model*, maka diperoleh nilai *R-square* sebesar 0.9908 yang artinya 99,08% variasi pada variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan) selama periode waktu penelitian. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,92% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

#### **E. Interpretasi Ekonomi**

Setelah mendapatkan hasil estimasi model regresi data panel, selanjutnya adalah membahas interpretasi variabel independen, yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan, terhadap variabel dependen Kemiskinan. Analisis dan pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil dari pengolahan data panel ke dalam teori ekonomi yang telah ada.

##### **1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin besar jumlah PDRB yang didapatkan, semakin berkurang jumlah kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi PDRB sebesar  $-13,34404$  dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap PDRB meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 13,34%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,000 yang

lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  dalam hal ini menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

PDRB merupakan salah satu pendapatan di tiap daerah yang dapat membantu mengurangi jumlah kemiskinan. Hal tersebut dapat terealisasi jika pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap lapisan golongan pendapatan masyarakat termasuk golongan penduduk miskin (Syahrullah, 2014).

PDRB juga merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Untuk di DIY sendiri tindakan agar dapat meningkatkan PDRB bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian diatas bahwa kenaikan PDRB dapat membantu mengurangi jumlah kemiskinan di DIY (Rahmawati, 2017).

Terdapat beberapa penjelasan mengenai dampak yang diberikan variabel PDRB terhadap kemiskinan yaitu kenaikan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat, kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat, ketersediaan fasilitas umum yang memadai, serta kualitas pendidikan di masyarakat yang semakin baik. Dengan secara

langsung hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan dari berbagai sektor kegiatan ekonomi (Sari dan Darussamin, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Permana, Anggit Yoga dan Arianti (2012), Nugroho (2015), Shafira (2017), dan Ayu (2018) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa untuk meningkatkan PDRB di Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah atau kurang berkembang perlu adanya melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mulai dari peningkatan produksi dan pengembangan di sektor-sektor yang lebih potensial serta pembangunan infrastruktur secara merata agar meningkatkan kualitas ataupun kuantitas masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Sehingga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut berarti meningkatnya PDRB secara efektif dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Kurniawati (2019) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena terjadi ketidakmerataan pendistribusian dari PDRB tersebut. Kesejahteraan masyarakat hanya dinikmati sebagian masyarakat saja, tetapi peningkatan tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal

tersebut menyebabkan kemiskinan belum dapat dientaskan dengan adanya peningkatan PDRB.

Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pertama, perlunya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih rendah atau tertinggal. Pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dengan cara memacu infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah yang pertumbuhan ekonominya masih rendah atau tertinggal. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan antar daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga kesejahteraan antar daerah dapat merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah pemanfaatan sektor-sektor yang lebih potensial di setiap daerah seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan (Kuswantoro dan Dewi, 2016).

Sektor pariwisata sangat berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut, pariwisata juga memberikan manfaat lain dari sisi ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, dan lapangan pekerjaan. Ada berbagai macam cara untuk memajukan pariwisata daerah, cara yang tepat untuk dilakukan adalah melalui media sosial. Wisatawan dapat dengan mudah memperoleh informasi dari media sosial sehingga banyak wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut. Dengan banyaknya wisatawan yang datang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masing

masing daerah. Kemudian di sektor pertanian dan perkebunan pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan keterampilan bagaimana cara bertani dan berkebun agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Di sektor industri dapat dilakukan cara dengan mengembangkan kerajinan kulit dan sejenisnya. Hasil dari ketiga sektor tersebut ketika di distribusikan keluar daerah dapat menjadi pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah tersebut (Ginting, 2013).

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan PDRB di DIY, melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi yang dimiliki tiap daerah pengembangan sektor-sektor yang berpotensi di tiap daerah, pemerataan pembangunan di tiap daerah, investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan swasta dan pemerintah, dan perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif (Astuti & Ayuningtyas, 2018).

## **2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan yang didapatkan, semakin berkurang jumlah kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi pendidikan sebesar  $-1.673159$  dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap pendidikan meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 1.67%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  dalam hal ini menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk peningkatan kualitas manusia, baik dalam arti perkembangan intelektual maupun keterampilan profesional. Pendidikan pada penelitian ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan memiliki manfaat yang cukup besar untuk dapat membantu masalah kemiskinan yang ada. Manfaat pendidikan bagi masyarakat pedesaan sebagai syarat untuk keluar dari masalah kemiskinan, yakni dapat membantu masyarakat pedesaan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan (Nurfauziah, 2018).

Selain itu, pendidikan yang baik seharusnya berfungsi juga sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat desa khususnya guna menghadapi masa depan. Pendidikan difokuskan melalui sekolah, pesantren, kursus-kursus yang didirikan di pedesaan yang masyarakatnya masih kurang pemahaman akan ilmu. Masyarakat pedesaan yang terberdayakan sebagai hasil pendidikan yang baik dapat memiliki nilai tambah dalam kehidupan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali (Putra dan Arka, 2016). Sehingga, peranan pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar harus dapat

terpenuhi bagi masyarakat pedesaan. Manfaat lainnya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Didu dan Fauzi (2016), Nurfauziah (2017), dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa ketika pendidikan seseorang semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan kecil. Dikarenakan ketika memiliki kualitas pendidikan yang baik maka taraf hidup dan kesejahteraan juga akan ikut meningkat (Didu dan Fauzi, 2016). Namun tidak lupa juga peran pemerintah juga sangat penting untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Syahrullah Dio (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Karena pada era globalisasi seperti ini pendidikan hanya sampai wajib belajar (9 tahun) merupakan hal yang biasa. Tidak cukup dengan bekal pendidikan itu saja orang dapat terhindar dari kemiskinan tapi juga harus memiliki keterampilan yang memadai.

Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu pengentasan kemiskinan. Pertama, pemataraan pendidikan, misalnya beasiswa miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program peningkatan pendidikan lainnya (Syahrullah, 2014). Dengan adanya beasiswa miskin dan BOS masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan dapat kembali sekolah.

Kemudian bantuan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan adanya wajib belajar, beasiswa bagi putra-putri terbaik, serta program khusus yang dilakukan pemerintah.

Program wajib belajar yang dijalankan pemerintah mempunyai tujuan agar masyarakat semua golongan termasuk masyarakat miskin tetap bisa untuk sekolah. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah bagi siswa yang berprestasi namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui bantuan beasiswa tersebut siswa dapat melanjutkan pendidikan yang lebih dapat tercapai (Nugroho, 2015). Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik. Sehingga dari beberapa kebijakan tersebut ketika pendidikan seseorang makin tinggi maka dapat membantu menekan tingkat kemiskinan yang ada di DIY.

Pendidikan di DIY memiliki pengaruh untuk mengentaskan tingkat kemiskinan yang ada. Oleh karena itu, beberapa kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan pendidikan yang ada pada masyarakat (Nurfauziah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Sitepu (2010), terdapat peran penting pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*Human Capital*). Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan investasi pendidikan. Dikarenakan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatnya



pengetahuan dan keterampilan seseorang. Sehingga, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga akan ikut meningkat dan dapat mendorong peningkatan produktivitasnya.

Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Digambarkan seseorang yang miskin yang mengharapkan pekerjaan yang baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, tidak cukup hanya berbekal pendidikan wajib belajar yang diberikan oleh pemerintah. (Handayani, 2017) menjelaskan peningkatan produktivitas tersebut akan mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan seseorang sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi Jumlah Penduduk sebesar 1.254471 dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 1.254.471 juta jiwa. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,052 yang lebih kecil dari  $\alpha = 10\%$  dalam hal ini menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septajaya (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah jumlah penduduk merupakan permasalahan yang mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan tidak tercapai tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Menurut Todaro (2000), besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam perhitungan indeks *Foster Greer Thorbecke (FGT)*, yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

#### **4. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten tidak pengaruh terhadap kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi Upah Minimum Kabupaten sebesar -0.356416 dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap Upah Minimum Kabupaten meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0.35%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,775 yang lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  dalam hal ini menyatakan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan dampak kebijakan kenaikan upah yang mengakibatkan kerugian kepada para pekerja yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pekerja yang terkena PHK disebabkan karena perusahaan tidak mampu untuk membayar upah. Para pekerja yang rentan terkena PHK adalah para pekerja yang mempunyai produktivitas rendah, perempuan, dan pendidikan rendah. Golongan tersebut akan terkena dampak dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten.